BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional berasal dari kontak dan interaksi diantara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman isu-isu Internasional mengalami perkembangan, negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu Internasional diluar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.

Hubungan Internasional bersifat sangat kompleks, karena didalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara, namun pada dasarnya, tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa :

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah

> kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional, sehingga interdepedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita dan Yani, 2005:3-4).

Berakhirnya Perang Dingin mengakhiri system *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara didunia pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke *isu-isu low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme).

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa :

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam transisi. Hal itu berdampak pada situasi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebaginya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005:7-8).

Dengan demikian, Hubungan Internasional kontemporer dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial, yang menyangkut aspek ideology, politik, hukum, ekonomi, soaial, budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut. Aksi diartikan segala sesuatu yang dilakukan aktor, sedang kondisi dimaksudkan segala sesuatu yang melingkupi

aksi baik yang memberikan peluang hambatan sehingga di antara aksi dan kondisi dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek lain seperti interdepedensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan dan lain-lain (Robert Jackson dan george Sorensen, 1999:34).

Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks, interaksi tidak hanya dilakukan antar negara saja melainkan juga aktor-aktor lain yang juga mempunyai peranan berpengaruh dalam Hubungan Internasional, *multinational corporation*(MNCs), organisasi lingkungan, kelompok-kelompok teroris, yang semuanya merupakan bagian dari politik dunia (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1999:1).

2.1.1 Paradigma dalam Hubungan Internasional

2.1.1.1 Paradigma Pluralis (*Pluralism*)

Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradigma pluralis adalah:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, MNCs, kelompok ataupun individu.

2. Negara bukanlah *unitary actor/*aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisis, dan kompromi antar aktor di dalam negara. Meluasnya pembahasan dalam agenda politik internasional.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau *national security*, tapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1990:1992-1993).

Bagi kaum pluralis, *interdepedensi* memiliki implikasi yang baik terhadap aktor-aktor hubungan internasional. Pluralis melihat bahwa kesempatan untuk membangun sebuah hubungan baik antara unit-unit yang interdependen sangat bagus. Mengelola hubungan interdependen meliputi pembuatan seperangkat aturan, prosedur, dan institusi yang terasosiasi atau organisasi internasional untuk mengatur interaksi dalam area-area isu (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1990:244).

2.2 Kerjasama Internasional

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antar negara dalam system Internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Barbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau

pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

K.J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu kerangka analisis* mengemukakan :

> " Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tententu dan mengadakan pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak" (Holsti, 1988:65)

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi lansung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan.

Menurut K.J. Holsti dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersma;
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Untuk lebih rincinya ada beberapa ciri atau bentuk tingkah laku yang berbeda-beda dalam menelaah kerjasama. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai:

1. pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
3. pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1987: 652-653).

Definisi diatas hanya dapat diaplikasikan pada kasus kerjasama internasional murni, saat dua kepentingan saling bertemu sedemikian rupa sehingga tidak ada pertentangan dalam pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, bahkan dalam transaksi yang paling kooperatif pun dapat melibatkan ketidaksesuaian, sehingga menimbulkan konflik. Tidak semua kerjasama dapat berjalan lancar seperti diharapkan. Sementara kerjasama internasional yang paling baik apabila dua aktor atau lebih memiliki kepentingan dan masalah yang sama.

Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam buku *Administrasi Internasional suatu kerjasama internasional* didorong oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya;
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu ngara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia;
3. Perubahan sifat peperangan, dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional;
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997:22)

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, yaitu :

1. Kerjasama universal (global)

   Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam

suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional;

2. Kerjasama regional

   Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan;

3. Kerjasama fungsional

   Dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya;

4. Kerjasama *ideologis*

Dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama *ideology*, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang *ideology*, dan juga memanfaatkannya (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

Yang menjadi masalah dalam kedaulatan dan kerjasama internasional adalah sejauhmana keterikatan dalam kerjasama tersebut diwujudkan dan sejauhmana kedaulatan itu dapat dikorbankan oleh masing-masing negara, karena tujuan utama dari kerjasama internasional itu sendiri untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Kerjasama terbagi atas tiga tingkatan, antara lain:

1. Konsensus, yaitu suatu tingkat kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat tersebut.
2. Kolaborasi, yaitu suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus. Ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, yang ditandai pula oleh saling keterlibatan yang aktif diantara negara-negara yang terlibat. Keuntungan didapat dalam kolaborasi ini dinilai pula sebagai hasil kerjasama.

3. Integrasi. Kerjasama ini ditandai oleh tingkat kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat didalamnya. Dalam kerjasama ini hampir mustahil pula ditemukan kepentingan yang berbenturan diantara negara-negara yang terlibat. (Smith dan Hocking, 1990: 222).

Kerjasama internasional dalam masyarakat internasional merupakan keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdepedensi (saling ketergantungan) dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Untuk mewujudkan kerjasama internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendorong maupun factor penghambat terwujudnya kerjasama tersebut.

Praktek kerjasama internasional di dalam masyarakat internasional dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

1. Faktor yang mendorong kerjasama internasional (faktor positif), terdiri dari:
    a. kemajuan teknologi yang dapat menghilangkan rintangan dan perbedaan antar bangsa, seperti alat transportasi modern serta alat komunikasi yang memungkinkan hubungan antarbangsa lebih cepat dan singkat.
    b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi
    c. Perubahan sifat peperangan, dimana suatu negara tidak dapat lagi menyisihkan diri atau terlepas dari atau terlepas dari bahaya peperangan.

2. Faktor yang menghambat (faktor negatif), terdiri dari:
    a. Kedaulatan negara, yang dapat menimbulkan persoalan sampai berapa jauh negara-negara bersedia membatasi diri dan menyerahkan sebagian kebebasan bertindaknya
    b. Kepentingan nasional, yakni jika terjadi persaingan atau benturan antar kepentingan nasional negara-negara yang bekerjasama
    c. Nasionalisme, yaitu rasa kebangsaan berlebih sehingga meremehkan bangsa lain.

Selain itu, masih ada faktor yang turut mempengaruhi kerjasama internasional, yaitu adanya perbedaan ideology, ekonomi, cultural, luas daerah, kepadatan penduduk, system pemerintahan dan lain-lain (Kartasasmita, 1987: 22-27).

2.2.1 Kerjasama Bilateral

Menurut T. May Rudi dalam bukunya *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*: “Kerjasama Bilateral adalah sebuah sebuah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan” (2003:5)

Dalam proses pelaksanaan Kerjasama Bilateral Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan tiga motif: (1995:67)

1. Memelihara Kepentingan Nasional
2. Memelihara Perdamaian

3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi.

Disamping badan-badan bilateral yang mempunyai hubungan dengan program pemberian bantuan luar negeri, biasanya di sebagian besar negara pemberi bantuan tersebut, terdapat pula badan serupa kementrian atau kelembagaan khusus yang bertanggung jawab atas kebijakan bantuan yang diberikan kepada negara-negara peminta bantuan dengan prosedur bilateral. Badan bilateral ini terbagi atas empat macam :

1. Kementrian (antara lain Jerman dan Inggris).
2. Badan semi-otonom di bawah kementrian (antara lain Kanada, Prancis, dan Swedia).
3. Badan otonom dalam Kementrian (antara lain Amerika Serikat).
4. Badan dengan tanggung jawab tersebar pada beberapa kementrian, atau badan di bawah koordinasi kementrian, tetapi melakukan koordinasi dengan badan atau kementrian lain dengan kedudukan semi otonom (misalnya Jepang).

Pemindahan sumber-sumber secara bilateral dapat dibedakan dalam tiga kategori :

1. *Grant* ialah pemberian atau hibah, terutama terdiri dari sumbangan berupa uang atau barang, biasanya ditujukan untuk aktivitas sosial (bantuan bencana alam dan semacamnya) dan biaya yng dikeluarkan untuk bantuan teknik serta pampasan perang (Jerman,Italia, dan Jepang).
2. Sumbangan serupa *Grant*, terdiri dari pemberian utang yang pembayaran kembalinya tidak harus dilakukan dalam bentuk “uang kertas” (hard

currency), dan dapat menggunakan mata uang setempat hasil penjualan komoditas (misalnya keperluan pangan sebagai bantuan), dan jika uang ia merupakan hak milik negara yang memberi bantuan.

3. Modal Pemerintah dalam waktu panjang, terdiri dari pemberian utang dengan masa pelunasan lebih dari satu tahun dan pembayaran kembali dalam mata uang negara pemberi atau dalam mata uang negara lain yang konvertibel.

2.3. Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional mulai menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional sejak tahun 1970-an. Pada saat itu negara-negara di dunia sedang mengalami krisis minyak yang disebabkan oleh pemboikotan pasokan minyak bumi oleh negara-negara Arab. Hal tersebut menggoyahkan stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia, sehingga krisis ini menjadi awal timbulnya kesadaran para pemegang otoritas pemerintahan bahwa faktor ekonomi menjadi sangat penting dan menentukan proses politik, dan sebaliknya. Pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik, serta antara negara dengan pasar semakin diakui. (Jackson, Robert dan George Sorensen.1999:177).

Menurut Robert Gilpin, dalam bukunya *The Political Economy of International Relations,* adalah sebagai berikut :

> "Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya msalah-masalah yang terjadi dalam system internasional. Pengkajian

> ekonomi-politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya masalah-masalah dalam isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi " (1987:3).

Dapat pula dinyatakan bahwa ekonomi-politik internasional adalah sebuah studi tentang masalah internasional yang terfokus pada elemen-elemen interdepedensi kompleks yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari.

Sedangkan Spero mengajukan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami makna ekonomi-politik internasional. Politik Internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan *"who gets what, when, and how?"* . Ekonomi Internasional menurut Joan Edelman, Spero, dalam buku *The Politics of International Economic Relations,* adalah sebagai berikut :

> "Ekonomi Internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi-politik internasional".

Lebih lanjut Spero mengemukakan bahwa ada empat cara faktor politik mempengaruhi ekonomi, yaitu:

- Struktur dan operasi system ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
- Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
- Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik.

- Hubungan dalam ekonomi internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara dan aktor non negara mengatur konflik dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.(1985:5).

2.3.1 Bantuan Luar Negeri

Istilah bantuan luar negeri (*foreign aid*) dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu di luar negeri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberi hibah atau pula penanaman modal mereka kepada pihak tertentu di negara lainnya.

Dalam prakteknya, bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep, juga suatu teori yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan membantu atau dalam rangka kerjasama satu sama lain untuk tujuan tertentu. Ini berkenaan dengan proses-proses ekonomi dan politik yang sukar terpisahkan di antara keduanya. Secara umum kosep-konsep itu meliputi:

1. Keinginan pihak pemberi dapat dilandasi oleh berbagai kepentingan, biasanya ekonomis dan politis. Pihak penerima pun menggunakan pikiran-pikiran yang serupa ekonomis dan politis ketika menerima bantuan tersebut.
2. Faktor-faktor yang bersifat politik dapat sama pentingnya dengan faktor-faktor yang bersifat ekonomis dalam hubungan dengan kontribusi yang

diperoleh oleh pihak pemberi maupun yang diberi bantuan. Namun ini banyak tergantung atas pemerintah pemberi dan pemerintah yang diberi bantuan.

3. Jarang sekali dijumpai kasus bantuan luar negeri yang bercorak murni ekonomis dan politis atau aspek lainnya semata. Kebanyakan orang membincangkan proses bantuan itu berupa hubungan ekonomi dan politik maupun lainnya secara timbal-balik (Yanuar 2007:188).

Pengertian Bantuan luar negeri menurut Todaro Michael. P, dalam bukunya *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Berkembang* yaitu :

> "Bantuan luar negeri yang saat ini dipakai secara luas adalah bantuan luar negeri yang meliputi semua peminjaman konsesional dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, yang secara umum ditujukan untuk mengalihkan sumber-sumber dari negara kaya ke negara-negara dunia ketiga" (1987:90-91).

Dengan demikian, kian jelas bahwa bantuan luar negeri meliputi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara ke negara lain yang memerlukannya menurut negosiasi. Berdasarkan atas pengertian demikian, maka bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi Bantuan berupa pemberian atau hibah (grant), Bantuan pinjaman (utang luar negeri), Investasi (penanaman modal) asing.

2.3.2 Investasi

Investasi adalah napas bagi pertumbuhan ekonomi, bagaimana tidak, rendahnya investasi pasti berdampak terhadap kemampuan menciptakan kesempatan kerja. Kemampuan Indonesia menarik investasi beberapa tahun ini semakin anjlok, tahun 1999 menorehkan catatan buru bagi investasi dengan

terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga tahun 2003. Defisit FDI (*Foreign Direct Investment*) tahun 2002 sebesar US$ 1,5 miliar. Dibandingkan negara ASEAN, aliran investasi yang masuk ke Indonesia sangat minim, sedangkan negara lain masih menikmati aliran investasi asing yang positif meskipun terimbas krisis. Thailand misalnya, setelah krisis melanda negara ini, sekarang dibanjiri oleh investasi asing dari perusahaan multinasional seperti elektronik dan otomotif seperti Honda, Isuzu, Ford (http//:www.sinarharapan.com).

Investasi di Indonesia meghadapi berbagai kendala, BKPM menginventarisir berbagai hambatan investasi yaitu :

- Kendala Internal yaitu kesulitan perusahaan untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan memperoleh bahan baku, kesulitan dana/pembiayaan, kesulitan pemasaran, adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.
- Kendala eksternal yaitu factor lingkungan bisnis baik dalam skala nasional, regional, maupun global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif (bisa berupa pembebasan pajak, PPh atau PPN serta bea masuk) atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah (http//:www.sinarharapan.com)

Oleh karena itu, penanaman modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, investasi membantu industrialisasi dalam membangun modal ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, tidak hanya membawa mesin dan uang tetapi juga membawa keterampilan

teknik. Mendorong pengusaha untuk kerjasama meniadakan problem neraca pembangunan dan penurunan tekanan inflasi, modal asing membantu modernisasi masyarakat dan memperkuat sector negara dan swasta.

Dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, M.L. Jingan menjelaskan pengertian investasi, yaitu :

> "Investasi (Investement) adalah setiap usaha pada sector-sektor ekonomi tertentu dengan untuk menghasilkan benefit return pada masa-masa mendatang, sedangkan bantuan lain dalam bentuk modal maupun teknik dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dengan didasari maksud-maksud tertentu; maksud ekonomi, moral kemanusiaan, politik, militer dan gabungan daripadanya" (1988:411).

Sedangkan pengertian investasi menurut Sri H. Yulianti dalam bukunya *Manajemen PortFolio dan Analisis*, mengatakan bahwa: "Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara penanaman modal, baik itu secara langsung, maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat (keuntungan tertentu) sebagai hasil dari penanaman modal tersebut" (1991:35).

Sedangkan motif dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri menurut Sumantoro dalam bukunya Kerjasama Investasi Asing, mengatakan bahwa :

> "Motif dari penanam modal untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri adalah mengambil keuntungan seoptimal mungkin, sedangkan motif negara penerima modal menarik penanam modal asing adalah untuk tujuan membantu biaya pembangunan nasional" (1978:16).

Menurut Winardi, dalam *kamus Indonesia* bahwa yang disebut investasi adalah :

1. Pembelian saham, obligasi dan barang-barang tidak bergerak, investasi berbeda dengan spekulasi.

2. Dalam teori ekonomi, investasi berarti membeli alat-alat produksi (termasuk didalamnya barang-barang untuk dijual) denga modal berupa uang (1998:135).

Dewasa ini dalam berbagai aspek kehidupan satu sama lain telah memberikan pengaruh terhadap yang lainnya, demikian halnya dengan Jepang, dengan memberikan bantuannya kepada Indonesia baik yang berbentuk pinjaman pembangunan, bantuan teknis ataupun bantuan lainnya secara langsung.

2.3.3 Teori Kesalingtergantungan (*Interdepedensi*)

Bagi negara-negara (sedang) berkembang sesungguhnya masih belum terlambat untuk bangkit *"self reliance"* dari keterbelakangannya, mempertegas kemampuan dan kapabilitas dirinya sehingga mampu mengubah dari tingkat ketegantungan dengan tingkat kesalingtergantungan (interdepedensi), kemudian dari tingkat keterbelakangan ke tingkat kemajuan dengan mengikuti arus global yang sudah tidak mungkin dicegah walaupun diketahui hal itu merupakan proses *status-quo* negara-negara adidaya ekonomi dan politik didunia. Intinya adalah, melakukan proses transformasi ketergantungan menjadi kerjasama berimbang dalam bidang ekonomi dengan konsep saling membutuhkan dan saling melengkapi (komplementasi) satu sama lain. Prinsipnya kesalingtergantungan ialah saling pengertian antarsatu pihak dengan pihak lain untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing secara adil dan berimbang. Karena pada dasarnya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sanggup hidup sendiri tanpa adanya negara lain yang menjadi relasinya.

Realitas hidup saling ketergantungan dikemukakan oleh Lester L. Brown, dalam bukunya *World Without Borders,* sebagai berikut :

> "Kenyataan yang tidak menyenangkan di Dunia ketiga yang hidup tergantung kepada negara-negara kaya dan industri maju, sebaliknya juga dialami oleh mereka. Langkanya sumber daya alam dan energi, serta tempat pasar-pasar industri mereka, memberikan posisi yang berimbang terhadap negara Dunia Ketiga terhadap ketergantungan yang sama di pihak *"rivalnya"*.

Negara-negara industri maju melakukan ekspansi modalnya ke negara berkembang, sesungguhnya amat tergantung kepada keberhasilan mereka untuk hidup dan tumbuh mengeksploitasi Dunia Ketiga itu. Bank-bank pemerintah dan swasta kapitalis dapat hidup dengan subur berkat perputaran modal mereka terutama karena adanya kerjasama saling menguntungkan dengan pihak MNC/TNC yang juga umumnya berasal dari negara-negara kapitalis.

Menurut Maghroori dan Ramberg dalam bukunya *Globalism Versus Realism: International Relation Debate*, ketergantungan dibagi atas tiga konsep :

1. Kesalingtergantungan, menunjukkan hubungan kepentingan yang apabila satu negara berubah, maka negara lain akan dipengaruhi oleh perubahan itu.
2. Kesalingtergantungan, berasal dari aspek ekonomi, yang menunjukkan bahwa hubungan itu terjadi ketika terdapat kepekaan nasional terhadap perkembangan ekonomi eksternal.
3. Kesalingtergantungan, merupakan pemikiran yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa kesalintergantungan melibatkan suatu peringkat tertentu, yang jika terputus akan sangat merugikan di antara mereka (1982:57-58).

2.6 Konsep Peranan

Peranan yang khas adalah regional defender yang menunjukkan peranan suatu negara dalam melindungi negara lain di kawasan tertentu, atau mediator (pengantar) yang menunjukkan peranan suatu Negara dalam membantu penyelesaian masalah Internasional

Peranan nasional akan berkaitan dengan kebutuhan domestik, sikap masyarakat, serta kondisi eksternal. Peranan nasional menggambarkan fungsi dan tugas suatu Negara dalam berbagai konteks Internasional yang berbeda. Dengan demikian peranan Internasional memberikan pedoman untuk bertindak, ketika situasi tertentu muncul pada lingkungan Internasional. Peranan nasional juga merefleksikan tujuan umum dan khusus yang hendak dicapai oleh suatu Negara, baik di daerah kawasan ataupun di dunia secara keseluruhan.

Dari ragam definisi, maksud dan peranan kerjasama antar negara, namun secara umum bisa disimpulkan, bahwa Negara secara keseluruhan, pada dasarnya mempunyai peranan_melalui kerjasama_terhadap negara lainnya. Dimana peranan ini bisa terbentuk, oleh karena ada beberapa andil dari negara-negara dalam rangka turut memberikan solusi penyelesaian terkait dengan kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh Negara lainnya. Menyadari bahwa, ini perlu dilakukan, mengingat peranan yang dominan yang dilakukan oleh suatu Negara, akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Negara mitranya.

Diantara kerjasama Internasional yang melibatkan negara satu dengan negara lainnya, adalah kerjasama negara-negara dunia di bidang ekonomi. Seperti

pembahasan yang tersebut diatas, bahwa sektor ekonomi saat ini memiliki peranan penting, yang sangat memungkinkan terjadinya hubungan lintas negara. Bahkan pada beberapa isu hubungan Internasional dewasa ini, yaitu pasca perang dingin, bidang ekonomi menjadi isu yang dominan.(Soedjono Soekanto 1998:220).